

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERANAN KEPALA DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI
MASYARAKAT DI BIDANG PEMBANGUNAN DI DESA GUNUNG
MELINTANG KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Islam Riau*

Karles Bronson

NPM : 147310668

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala ketertbataasan akhirnya karya ilmiah yang di tulis dalam skripsi ini dapat penulis selesaikan

Skripsi yang berjudul “ Peranan Kepala Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” ini penulis ajukan ke fakultaas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab usulan penelitian ini sesuai dengan kaedah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembaran tertentu terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal tersebut penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terima kasih kepada.

1. Bapak Rektor UIR bersama dengan dekan Fisipol yang menyediakan fasilitass dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam membina ilmu dan lembaga yang beliau pimpin.

2. Bapak Budi Muliarto., S.IP, M .Si selaku Ketua Program Studi dan jajaran Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr.H.Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.M.Si dan Bapak Data Wardana.,S.Sos.M.Ip selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
4. Dan seterusnya Kepada almarhum Ayahanda tercinta Ali Amran dan Ibunda Tercinta Yusmani beserta keluarga besar yakni abang Dardi, abang Ceprianto dan adik Yulvi wulandari selanjutnya teman seperjuangan Afrianto.,S.Ip dan teman Kelas IP I angkatan 2014 dan mahasiswa Fisipol pada umumnya yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis bermohon Kepada yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau-beliau itu di balasi dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 13 Desember 2019

Karles Bronson

**PERANAN KEPALA DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI
MASYARAKAT DI BIDANG PEMBANGUNAN DI DESA GUNUNG
MELINTANG KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

ABSTRAK
Karles Bronson

Kata Kunci : Peranan, Patisipasi, Pembangunan

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Kepala Desa Dalam Mendorong Masyarakat di Bidang Pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, serta mengetahui apa saja hambatan peranan Kepala Desa Dalam Mendorong partisipasi Masyarakat Di bidang Pembangunan. Populasi pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, RT dan RW, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum (KK), berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai peranan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat di Bidang Pembangunan yaitu pada indikator stabilitator yang menyatakan berperan sebanyak 50% responden dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 50% responden dan yang menyatakan tidak berperan sebanyak 0% responden, kemudian pada indikator inovator yang menyatakan berperan sebanyak 47% responden dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 50% responden kemudian yang menyatakan tidak berperan sebanyak 3%. Kemudian pada indikator modernisator yang menyatakan berperan sebanyak 44% dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 56% responden. kemudian pada indikator pelopor yang menyatakan berperan sebanyak 47% responden dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 53% kemudian yang menyatakan tidak berperan sebanyak 1% responden. kemudian pada indikator pelaksana sendiri yang menyatakan berperan sebanyak 47% yang menyatakan kurang berperan sebanyak 50% dan yang menyatakan tidak berperan sebanyak 3%. Dari hasil tiga indikator tersebut maka penulis membuat tabel rekapitulasi peranan Kepala Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, yang jika di rata-rata yang menyatakan berperan sebanyak 17 responden dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 18,6% responden dan yang menyatakan tidak berperan sebanyak 0,4% responden. Yang mana jika di persentasekan yang menyatakan berperan sebanyak 47,22% dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 51,66% dan yang menyatakan tidak berperan sebanyak 1,11%. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan Kepala Desa dalam Mendorong Masyarakat di Bidang Pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah kurang berperan. Saran maupun masukan dari penulis adalah Kepala Desa di harapkan mampu menciptakan dorongan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan, karena dengan ada nya keikutsertaan tersebut maka program pembangunan yang di rencanakan akan berjalan lancar dan tepat sasaran.

THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN ENCOURAGING COMMUNITY PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT FIELD IN GUNUNG VILLAGE KUANTAN HILIR DISTRICT KUANTAN SINGINGI REGENCY

ABSTRACT
Karles Bronson

Keywords: Role, Participation, Development

This research was conducted in Gunung Melintang Village, Kuantan Hilir Subdistrict, Kuantan Singingi Regency, while the purpose of this study was to study the role of the Village Head in Encouraging Communities in the Field of Development in the Gunung Melintang Village, Subdistrict Kuantan Hilir District, Kuantan Singingi District, and also whatever else was sought as Village Head in Encouraging Community Participation in the Field of Development. The population in this study is the Village Head, Village Secretary, BPD, RT and RW, community leaders, and the general public (KK), based on the results of the study that the authors propose about the Village Head in encouraging community participation in the Field of Development based on the indicator of the stabiliator that states receiving as much 50% of respondents and those who stated they did not receive as much as 50% of respondents and those who said they did not receive as much as 0% of respondents, then in the selected innovator indicator were 47% of respondents and who stated less attractive were 50% of respondents who did not receive as much as 3%. Then in the agreed modernist indicators as much as 44% and those who were declared less agreed as many as 56% of respondents. Then in the pioneer indicators that were agreed as many as 47% of respondents and those declared less successful as much as 53% then those who were declared not playing a role as much as 1% of respondents. then the executing indicator itself states that they accept as much as 47%, which states they do not receive as much as 50%, and who states they do not accept as much as 3%. From the results of these three indicators, the writer makes a recapitulation table for the role of the Village Head in Encouraging Community Participation in the Field of Development in Gunung Melintang Village, Kuantan Hilir Subdistrict, Kuantan District, singing, which on average is asked by 17 respondents and 18 proven to be less useful , 6% of respondents and those who said they did not receive 0.4% of respondents. Which if percentage is included as much as 47.22% and as many as 51.66% less accountable and as many as 1.11% stated that they did not receive. So it can be concluded that the role of the Village Head in Encouraging Communities in the Field of Development in Gunung Melintang Village, Kuantan Hilir Subdistrict, Kuantan Regency, singing is less preferred. Suggestions and input from the author are the Village Head above, supporting development to the community for development, for this participation the planned development program will run well and on target.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	12
A. Studi Kepustakaan	12
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Pikir	27
D. Hipotesis	28

E. Konsep Operasional	28
F. Operasional Variabel	29
G. Teknik Pengukuran	32
BAB III. METODE PENELITIAN	35
A. Tipe Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel	36
D. Teknik Penarikan Sampel	37
E. Jenis dan Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV: DISKRIPSI LOKASI PENELLITIAN	40
A. Sejarah Ringkas Desa Gunung Melintang	40
B. Struktur Organisasi Desa.....	46
C. Fungsi Dan Tugas Organisasi	47
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Identitas Responden	52
B. Hasil dan Pembahasan data Indikator Variabel Stabilitor.....	55
C. Hasil dan Pembahasan data Indiktor Variabel Inovator.....	60
D. Hasil dan Pembahasan data Indikator Variabel Modernisator.....	63
E. Hasil dan Pembahasan data Indikator Variabel Pelopor	66
F. Hasil dan Pembahasan data Indikator Variabel Pelaksana Sendiri	70

BAB VI : PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Data Pembangunan Di Desa Gunung Meleintang	7
II.1 Tabel Penelitian Terdahulu	25
II.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Kepala Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	29
III.1 Daftar Populasi Dan Sampel	37
IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	43
IV.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaaa	43
IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	44
IV.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	45
V.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
V.2 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	53
V.3 Tingkat Umur Responden.....	54
V.4 Distribusi Penilaian Indikator Stabilitor	56
V.5 Distribusi Penilaian Indikator Inovator	60

V.6 Distribusi Penilaian Indikator pelopor..... 64

V.7 Tabel Rekapitulasi Penelitian 74



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

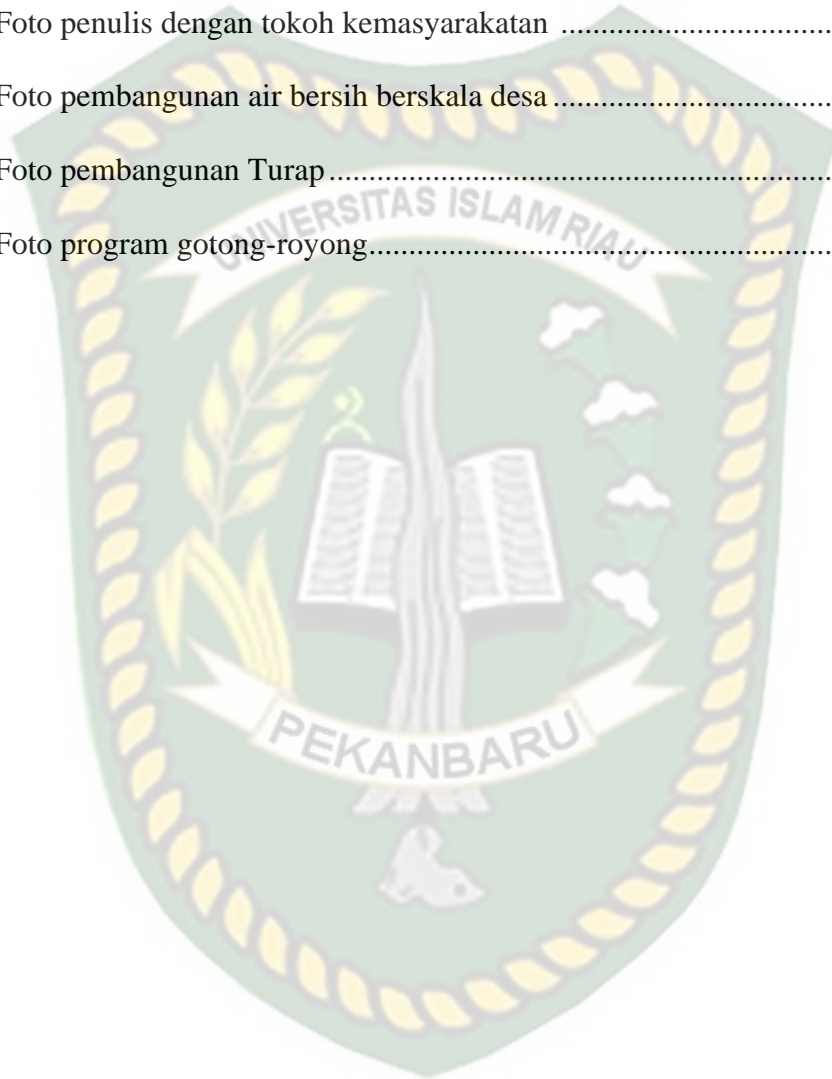
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Kerangka Pikir	27
IV.1 Struktur Organisasi Desa Gunung Melintang	46



DAFTAR LAMPIRAN

Gambar	Halaman
1. Foto penulis dengan perangkat Desa Gunung Melintang	84
2. Foto penulis dengan tokoh kemasyarakatan	84
3. Foto pembangunan air bersih berskala desa	84
4. Foto pembangunan Turap	86
5. Foto program gotong-royong.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Keberadaan pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana telah di atur dan di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18 ayat 1 s/d 6 yang mana sebagai wujud dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Bahwa Negara Indonesia terdiri dari Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah proses penyelenggaraan otonomi merupakan jawaban yang sangat tepat dalam mendorong proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara Demokratis. Pengembangan dan pembangunan otonomi daerah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di arahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas pada pemerintah daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan disegala bidang baik didaerah maupun di Desa.

Menurut widjaja (2003:7) tugas dari pemerintah Desa adalah menyelenggarakan rumah tangga sendiri, disamping itu ia juga dapat dibebani tugas pembantuan yang diberikan instansi vertikal (Garis menegak) atau daerah otonom atasan. Dalam bahasa inggris, pemerintahan disebut *government* (Latin

gubernare, Grek Kybernan, artinya to sterr, mengemudikan atau mengendalikan. (Ndaraha, 2010 : 7).

Menurut Soetardjo Desa adalah suatu Daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa, hanya dapat di ketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan pihak luar. (dalam Sadu Wasistono, 2007 : 14).

Partisipasi dapat dipahami dalam dua hal yaitu: *pertama*, partisipasi merupakan sebuah alat, dimana partisipasi dilihat disebuah telnik untuk membantu memajukan program Desa atau disebut pembangunan partisipasi. *Kedua*, partisipasi sebagai tujuan itu sendiri yang dapat di nyatakan sebagai pemberdayaan rakyat yang dipandang dari segi perolehan keahlian, pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk pembangunan.

Dapat diberi kesimpulan bahwa partisipasi mengandung pengertian keikutsertaan itu baik atau turut sertanya seseorang anggota masyarakat dalam suatu kegiatan kemasyarakatan keikutsertaan itu baik secara mental, emosi, maupu energi dimana masyarakat mempunyai kemauan untuk berinsiatif dan kreatif dalam melaksanakan kegiatan Desa dengan memberikan dukungan dan bertanggung jawab dengan penyelenggaraan kegiatan pembangunan agar terciptanya pembangunan secara baik dan tercapainya harapan masyarakat.

Pemerintahan Desa perlu memiliki pemimpin yang memberikan pembinaan kepada masyarakatnya dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, dalam ketentuan peraturan Pemerintah tentang Desa bahwa pemerintah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, peraturan pemerintah tentang Desa itu, ingin menerangkan bahwa pemerintah sangat menghormati adat istiadat masyarakat Desa sesuai dengan hak tradisionalnya, hal ini pun akan berdampak yang positif dalam rangka partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintahan dalam pembangunan, partisipasi disini memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa dan memiliki dan turut serta dan bertanggung jawab terhadap perkembangan pembangunan yang ada di wilayahnya. Dalam pengaturannya Desa harus memiliki asas-asas yang mana asas tersebut sesuai dengan Undang-Undang nomor 06 tahun 2014 pasal 24 yaitu:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektifitas dan efisiensi

- i. Kearifan local
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif

Pembangunan Desa harus disusun secara tepat dan sesuai dengan aspirasi, keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat yang diprioritaskan dari RPJMDES. Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terus merupakan kemajuan dan perubahan menuju kearah yang di capai. Pembangunan yang dilaksanakan di perdesaan merupakan realisasi pembangunan Nasional. Untuk menunjang pembangunan di perdesaan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimamfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula halnya sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Otonomi daerah memiliki arti otonomi Desa bahwa Desa mampu berinisiatif dan berkeaktifitas untuk menjalankan pemerintahannya serta menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga Desa memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan karena tidak terbebani lagi dengan program-program pembangunan dari Kabupaten/Kota, Provinsi maupun pemerintah Pusat. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut harus di bimbing dan di arahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan

perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab, sampai pemamfaatan pembangunan akan bisa dirasakan secara merata oleh pihak-pihak tertentu.

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka kepala Desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengait termasuk tugas yang multi dimensional.

Menurut Moel Jarto (1991: 136) mangartikan partisipatif merupakan pernyataan mental secara emosional seseorang dalam suatu situasi kelompok yang mendorong mereka menyambungkan daya pikir dan perasaan mereka bagi tercapainya tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut.

Menurut Conyers (1991 : 154) yang mengatakan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan, yaitu :

1. Partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.

2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut.
3. Adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pemabangunan masyarakat sendiri.

Mengenai wewenang kepala Desa di jelaskan pada Undang-Undang tentang Desa Nomor 06 Tahun 2014 tepatnya pada pasal 26 ayat 2 yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan anggaran dan pendapatan dan belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosia budaya masyarakat Desa;
- l. Memafaatkan teknologi tetap guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam maupun diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 di sebutkan bahwa kepala Desa bertugas, menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, membina kemasyarakatan Desa, pemberdayaan kemasyarakatan Desa. Menurut Hanif Nurcholis (2004 : 77) Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam pembangunan tentunya memerlukan dana, mengenai pendanaan atau keuangan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tepatnya pasal 72 ayat 1, Pendapatan Desa bersumber :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong- royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Untuk lebih jelas lagi berikut adalah daftar program pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel I.I : Tabel program Pembangunan Di Desa Gunung Melintang Tahun 2017

No	Pembangunan	Biaya (Rp)	Sumber Dana
1	Pembangunan atau pemeliharaan jembatan Desa (jembatan, Gorong-gorong, box culvert)	44.320.800	Bankeu Provinsi
2	Pembangunan, pemamfaatan jalan pemukiman	247.611.900	Bankeu Provinsi

1	2	3	4
3	Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air bersih berskala Desa	594.040.000	APBDES (APBN)
4	Pembangunan atau pemeliharaan turap	72.583.600	Bankeu Provinsi
5	Pembangunan saluran drainase	14.483.700	Bankeu Provinsi
6	Pembangunan sumur atau pemandian umum	44.700.000	APBDES
7	Renovasi kantor kepala desa	34.500.900	APBDES

Sumber : Kantor Kepala Desa Gunung Melintang, 2018

Tabel di atas merupakan daftar program pembangunan di Desa Gunung Melintang, pembangunan tersebut bersumber dari bantuan keuangan provinsi dan APBN yang di distribusikan ke Desa. Selain permasalahan kurangnya pelibatan masyarakat terdapat juga pembangunan yang tidak jelas kegunaannya contohnya saja pembangunan sumur atau pemandian umum, sejak pembangunannya masyarakat tidak menggunakan sumur atau pemandian tersebut sebagai mana mestinya, hal itu dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk mandi di sungai atau pemandian pribadi selain itu juga pembangunan sumur atau pemandian tersebut lokasinya tidak tepat yaitu di bangun dekat dengan sungai. Dari permasalahan tersebut peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan maupun kesalahan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Desa Gunung Melintang.

Mengenai pembangunan di Desa Gunung Melintang sendiri dana bersumber dari APBN dan APBD yang di distribusikan ke Desa untuk dijadikan APBDES dana tersebut dimaksudkan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan di Desa. Selanjutnya, pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi terkesan lamban dan banyak pembangunan yang tidak jelas kegunaannya karena keterlibatan maupun partisipasi masyarakat sangat kurang, dan pemerintah Desa tidak mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif selain itu jika dibandingkan dengan desa di sekitarnya pembangunan di desa gunung melintang sendiri terbilang lambat, dikarenakan hal inilah alasan peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang permasalahan pembangunan di desa Gunung Melintang . Hal

ini bertolak belakang dengan wewenang Kepala Desa yang terdapat pada Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tepatnya pada pasal 26 ayat 2 poin (m).

Tabel I.11 : Pembangunan yang dilakukan di Desa Gunung Melintang

No	Pembangunan	Biaya (Rp)	Sumber Dana	Pelaksana Program	Masyara kat	Pekerja Luar
1	Pembanguna n Air Bersih Skala Desa	594.040.000	APBDES	Kontraktor	-	25 orang
2	Pembanguna n sumur atau pemandian umum	44.700.000	APBDES	Desa	3 Orang	7 Orang
3	Renovasi kantor Kepala Desa	34.500.900	APBDES	Desa	-	5 Orang

Sumber : Sekretaris Desa Gunung Melintang,2018

Dari data di atas dapat disimpulkan pelibatan masyarakat dalam pembangunan sangat kurang hal itu dapat dilihat dari banyaknya pekerja luar Daerah maupun Desa lainyang di ikut sertakan dalam program pembangunan Desa. Pembangunan air bersih berskala desa contohnya program pembangunan tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dari hal tersebut seharusnya desa bisa saja membuat kesepakatan dengan kontraktor untuk melibatkan beberapa anggota masyarakat.Selanjutnya pembangunan sumur atau pemandian umum dalam pembangunan tersebut anggota masyarakat yang terlibat hanya 3 orang sementara pekerja luar 7 orang. Dan yang terakhir renovasi kantor kepala desa dalam renovasi tersebut tidak ada masyarakat yang terlibat, yang dilibatkan semuanya dari pekerja luar sementara pelaksana program tersebut adalah desa bukan kontraktor.Adapun fenomena-fenomena permasalahan yang terjadi di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan singingi adalah Sebagai berikut:

- a. Adanya indikasi kurangnya pelibatan masyarakat dalam pembangunan yang berdampak kepada pembangunan yang kurang tepat sasaran

- b. Adanya dugaan pembangunan yang tidak jelas kegunaannya
- c. Adanya indikasi lokasi pembangunan yang kurang tepat

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dan gambaran masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian yaitu “ Bagaimana peranan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat di bidang pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi “.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang hendak penulis akan diteliti tersebut seperti yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besarnya peranan kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan Desa di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peranan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat di bidang pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi mamfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbang pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan dan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah perencanaan pembangunan.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Desa Gunung Melintang dalam melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang, khususnya pada pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singing.
3. Bagi Penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Pustaka

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

1. Konsep Pemerintah

Secara etimologi Pemerintahan adalah melakukan pekerjaan menyeluruh yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak. Yaitu memerintah wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. (dalam Syafiie, 2003:22)

Penyelenggaraan dan pelaksanaan tujuan negara, terdapat Pemerintah yang menjalankan kegiatan-kegiatan Pemerintahan dalam suatu negara. Defenisi atau pengertian Pemerintah, terdapat dua pengertian yaitu Pengertian Pemerintah dalam arti luas dan Pemerintah dalam arti sempit. Pengertian Pemerintah dalam arti luas (regering) adalah pelaksana tugas seluruh badan-badan, lembaga dan petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan defenisi atau pengertian Pemerintah dalam arti sempit (bestuur) adalah mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas Pemerintahan.

Sementara itu menurut Dharma (2002;33) Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan Undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan,

mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan dan mengarahkan segenap daya upaya masyarakat atau penduduk dalam suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.

Selanjutnya menurut Budiarjo (2003;21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berdasarkan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep Dasar Negara tersebut.

Pemerintah dalam menjalankan Pemerintahan, mempergunakan alat pembentukan dan pelaksanaan dari keputusan Pemerintah haruslah benar-benar hati-hati didalam bertindak, karna jika terjadi kesalahan yang merugikan masyarakat, maka timbul tanggung gugat Pemerintah.

Menurut Munaf (2016; 202) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintahan dan Negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat.

2. Konsep Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkah diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan

Menurut Seokanto (2003;243) Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Adapun peranan seseorang meliputi:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan disini di artikan sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai suatu perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2004:148) peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Yang mana perilaku ini dapat membuat pengaruh di sekitarnya.

Selanjutnya Menurut Ndraha (2005;53) Peran diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan atau ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator. Sehingga dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah kewajiban yang

dimiliki oleh individu atau organisasi dan diharuskan segala sesuatu mengenai tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Pemerintahan Desa

Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa.

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-asul yang bersifat istimewa. landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.” (Widjaja,2003:3).

Menurut Siagian (2012;142) menyebutkan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan adalah:

- a. Sebagai stabilikator
- b. Sebagai inovator
- c. Sebagai modernisator
- d. Sebagai pelopor
- e. Pelaksana sendiri

Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1979 desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang di dalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 terdapat beberapa penjelasan tentang Desa yaitu:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

4. Konsep pembangunan partisipatif

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok maupun masyarakat untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Partisipasi dapat di definisikan sebagai keterlibatan mental/fikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Partisipasi adalah hal ikut sertanya setiap orang suatu kegiatan Merupakan aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Bila kita hubungkan dengan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Masyarakat dalam kedudukannya sebagai subjek pembangunan dituntut dalam memberikan sumbangan terhadap apa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kesiapan memberikan sumbangan ini bukan lahir begitu saja, akan tetapi terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu yang di capai. Disamping juga adanya upaya-upaya yang kita lakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan

Pemerintah diharapkan dapat melakukan pendekatan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Sautu hal yang perlu di ingat bahwa masyarakat tidak merasa memiliki apabila dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut, mereka diikut sertakan. Selain itu dalam menyusun program pembangunan, maka haruslah melibatkan masyarakat, karena sangat susah apabila dalam pelaksanaan program pembangunan perencanaannya tidak melibatkan masyarakat. Jadi pemerintah harus bersama-sama masyarakat dalam penyusunan suatu rencana program pembangunan sampai pada pelaksanaannya. Dengan demikian, dapat dipahami pentingnya partisipasi untuk menggerakkan masyarakat dalam suatu rencana program pembangunan pencapaian sasaran yang di inginkan.

Diperlukan upaya untuk lebih meyakinkan masyarakat partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah

dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi.

Jenis-jenis dan bentuk-bentuk partisipasi antara lain:

- a. Partisipasi dengan pemikiran (Psicological Partisipation)
- b. Partisipasi dengan tenaga (Physical partisipation)
- c. Partisipasi dengan pikiran dan tenaga atau partisipasi aktif (Aktif Partisipation)
- d. Partisipasi dengan keahlian (With Skill partisipation)
- e. Partisipasi dengan barang (Material Partisipation)
- f. Partisipasi dengan uang (Money Partisipation)
- g. Partisipasi dengan jasa (Service Partisipation)
- h. Bentuk konsultasi
- i. Bentuk sumbangan spontan berupa barang atau jasa.
- j. Bentuk sumbangan dari luar dalam bentuk proyek yang bersifat berdikari
- k. Bentuk proyek yang dibiayai oleh komite setelah ada konsensus dalam rapat komniti
- l. Bentuk sumbangan dalam bentuk kerja jasa
- m. Bentuk aksi massal mengerjakan proyek secara sukarela
- n. Bentuk mengadakan perjanjian bersama untuk bekerjasama melampaui suatu tujuan/cita-cita
- o. Bentuk melakukan pembangunan dalam lingkungan keluarga
- p. Bentuk pembangunan proyek komuniti yang Otonom.

Apabila jenis-jenis dan bentuk-bentuk partisipasi tersebut terus di tingkatkan secara terus menerus, maka segala program pembangunan yang di tetapkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Hal ini jga memungkinkan terjadinya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.

Partisipasi dapat dipahami dalam dua hal yaitu: pertama, partisipasi merupakan sebuah alat, dimana partisipasi dilihat sebagai sebuah teknik untuk membantu memajukan program desa atau disebut pembangunan partisipasi. Kedua, partisipasi sebagai sebuah tujuan itu sendiri yang dapat dinyatakan sebagai pemberdayaan rakyat yang dipandang dari segi perolehan keahlian, pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun.

Di dalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebut boleh di katakan cukup baik, tingkat ini tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan.

Menurut Adisasmita (2006:38) partisipasi masyarakat dapat di defenisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan.

Peningkatan partisipasi masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemamfaatan dan

pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien, yaitu dalam hal sebagai berikut:

- a) Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi).
- b) Aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan).
- c) Aspek keluar atau output (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi).

Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan didengarkan dalam berbagai forum dan kesempatan,. Intinya adalah agar masyarakat umum atau sebanyaknya orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagai “pengikutsertaan” atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama.

Menurut dwipayana (2003:81), partisipasi masyarakat menyangkut dua dimensi yakni keluar dan kedalam. Yang pertama, menyangkut partisipasi yang melibatkan pemerintah itu sendiri dan kedua, menyangkut partisipasi warga desa terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi yang melibatkan pemerintahan itu sendiri adalah menyangkut seberapa besar keikutsertaan aparatur desa dalam pembangunan desa, hal ini dapat tercermin dari penegakan demokrasi, menjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga adat maupun agama yang ada, pengelolaan konflik dan menciptakan masyarakat yang mandiri serta menjalankan pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku.

Di dalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebutpunboleh dikatakan cukup baik, tingkat ini

tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dapat memunculkan kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama, budaya, yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat tersebut secara maksimal.

Menurut Tjokromidjojo (dalam safi'i, 2007:104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu:

- a) Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- b) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- c) Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian integral yang harus di tumbuh kembangkan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging), rasa tanggung jawab (sense of responsibility) dari masyarakat secara sadar, bergairah dalam tanggung jawab.

Di lihat dari pengamatan penulis ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Faktor-faktor tersebut

dapat bersifat positif maupun negatif. Faktor-faktor yang bisa menjadi daya pendorong agar masyarakat ikut berpartisipasi yaitu:

- a) Partisipasi dilakukan melalui usaha penerapan demokrasi artinya masyarakat desa diberikan kesempatan memilih dan memutuskan apa yang dikehendaki baik di antara alternatif pemerintah maupun maupun dari alternatif masyarakat itu sendiri.
- b) Partisipasi itu dilakukan dalam organisasi yang sudah dikenal atau sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
- c) Partisipasi dilakukan dalam upaya perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa.
- d) Setiap keputusan masyarakat, sepanjang mengenai kepentingan mereka harus dihormati dan di akui.

Partisipasi masyarakat menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok dalam hal pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut:

Menurut Taliziduhu Ndraha (2005:103) ada beberapa wadah bagi terwujudnya partisipasi masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Partisipasi bentuk ide/pikiran (yang diberikan dalam rapat), rapat yang dimaksud rapat mingguan di desa, seminar, penataran-penataran.
- 2) Partisipasi bentuk fisik/tenaga, yang diberikan dalam perbaikan pembangunan agar partisipasi tenaga merupakan pendorong, perlu di usahakan penertiban, penjelasan-penjelasan tentang mamfaat. Dari partisipasi ini banyak hal yang di dapat antara lain bangkitnya rasa berlomba, rasa tanggung jawab.
- 3) Partisipasi bentuk materi/barang, dikalangan masyarakat masih hidup kesediaan memberi harta benda terhadap usaha yang dirasakan

meringankan beban hidup mereka seperti perbaikan kondisi jalan, sumbangan ronda malam.

- 4) Partisipasi bentuk dana/uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

5. Konsep Pembangunan

Agus suryono memberikan defenisi pembangunan bahwa pembangunan seharusnya merupakan suatu proses yang saling terkait antara proses pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan demokrasi politik yang terjadi dalam lingkaran sebab akibat kumulatif (circulan cumulative caution). Pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata pembangunan di artikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warga negaranya (Budiman, 1995:1).

Menurut Suroto, pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Guna penetapan tujuan dan sasaran pembangunan pada tiap tahap, untuk alokasi sumber-sumber serta mengatasi rintangan keterbatasan dan pertentangan ini dan untuk melakukan koordinasi kegiatan,diperlukan kebijaksanaan memuat program dan cara-cara yang relevan dan efektif yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan kata lain, kebijaksanaan berisi tujuan keseluruhan dan tujuan tiap program yang hendak dicapai pada tiap tahap pembanngunan, cara yang perlu dilakukan untuk mengatasi semua atau berbagai keterbatasan, rintangan-rintangan dan pertentangan yang ada atau di perkirakan akan terjadi, cara mengalokasikan

sumber-sumber pembangunan yang optimal, serta cara melakukan koordinasi semua kegiatan yang efektif. (Suroto, 1983:78).

Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu. Pertama, berarti memberikan perhatian terhadap kapasitas, terhadap apa yang diperlukan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. Kedua, ia mencakup keadilan (equity), perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. Ketiga, penumbuhan kuasa dan wewenang, dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang mamfaat tertentu maka mereka akan mereka akan menerima mamfaat pembangunan. Dan pada akhirnya pembangunan berarti perhatian yang sungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya. (Kateran,2008:37).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan dengan Penelitian Penulis yang berjudul Peranan Kepala Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

NO	Nama	Judul Penelitian	Indikator	Lokasi
1	2	3	4	5
1	Ardi Wardiono 097310089	Peranan Penghulu Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan sarana fisik Di kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	1. Sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Indikator Berbeda 2. Tahun Penelitian 3. Lokasi Penelitian
2	Femri Atwar 097310534	Peranan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Ludai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	1. Kesamaan Indikator Penelitian 2. Sama-sama membahas Peranan Kepala Desa	1. Judul Berbeda 2. Tahun penelitian 3. Lokasi Penelitian

1	2	3	4	5
3	Putri Mulda Rezki 067310171	Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LMP) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (suatu study Tentang Pembangunan Fisik alam Swadaya Masyarakat di desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu)	1. Sama-sama meneliti tentang Partisipasi Masyarakat	1. Meneliti tentang Peranan Lembaga berbeda dengan penelitian yang sedang di lakukan penulis 2. Lokasi Penelitian 3. Tahun penelitian
4	Muhammad Niggoh 127310721	Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi masyarakat pada Pembangunan di kampung (Desa) Batan Kecamatan Lindun Kabupaten Meng Provinsi yala Thailand Selatan	1. Sama-sama Meneliti Tentang partisipasi Masyarakat	1. Lokasi Penelitian Berbeda 2. Tahun Penelitian Berbeda

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

B. Kerangka Pikir

Berikut merupakan skema kerangka konseptual yang akan di gunakan peneliti atau penulis dalam melakukan penelitian

Gambar I. I: Kerangka pikir Peranan Kepala Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Di Desa Gunung Melintang.



Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

C. Hipotesis

Jika partisipasi masyarakat di bidang pembangunan di Desa Gunung Melintang harusnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan dan hendaknya Pemerintah Desa harus mengikut sertakan masyarakat supaya Pemerintah mengetahui apa sebenarnya hal yang paling dibutuhkan masyarakat, disamping itu dengan keikutsertaan masyarakat maka masyarakat bisa secara langsung menyampaikan aspirasi.

D. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penilaian serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka perlulah kiranya penulis menoperasionalkan konsep tersebut dengan batasan sebagai berikut:

1. Peranan adalah berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.
2. Pemerintah adalah pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, mempergunakan alat hukum yang salah satunya merupakan keputusan tata usaha negara. Proses pembentukan dan pelaksanaan dari keputusan pemerintah haruslah benar-benar hati-hati didalam bertindak, karena jika terjadi kesalahan yang merugikan masyarakat, maka timbul tanggung gugat pemerintah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten.

4. Partisipasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok maupun masyarakat untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat dalam mencapai tujuan masyarakat tersebut.
5. Pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Guna penetapan tujuan dan sasaran pembangunan pada tiap tahap untuk alokasi sumber-sumber serta untuk mengatasi rintangan keterbatasan dan pertentangan ini dan untuk melakukan koordinasi kegiatan, diperlukan kebijaksanaan yang memuat program dan cara-cara yang relevan dan efektif yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembangunan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan di Desa gunung Melintang dapat di operasionalkan dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Faktor pendukung yang dimaksud adalah segala sesuatu yang sifatnya membantu atau mendukung peran serta masyarakat dalam pembangunan yang ada di Desa Gunung Melintang agar berjalan lancar sesuai keinginan.
- b. Faktor penghambat yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menjadi pengganjal atau yang menghalangi keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan yang ada di Desa Gunung Melintang.

E. Operasional Variabel

Menurut singarimbun (1995:46) defenisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain defenisi operasional berisi tentang indikator-indikator yang akan

digunakan untuk mengukur variabel. Maka yang menjadi operasionalisasi dalam penelitian adalah kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tabel II. 1: Konsep Peranan Kepala Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
Peran adalah menurut Veithzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.	Peranan Kepala Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Di desa Gunung Melintang	1.Stabilisator	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga dan memelihara kerukunan,keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat desa b. Memeningkatkanpembangunan desa c. Menjaga dan memelihara hasil pembangunan desa d. Meningkatkan sosial masyarakat 	Ordinal
		2.Inovator	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembaharuan program pembangunan desa dalam bentuk ide, saran, pendapat, dan masukan untuk pembangunan b. Pembaharuan metode sistem kinerja pemerintahan Desa 	Ordinal

1	2	3	4	5
		3.Modernisator	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan modernisasi dalam pembangunan b. Visi pembangunan yang jelas 	Ordinal
		4.Pelopor	<ul style="list-style-type: none"> a. Menunjukkan contoh dalam pelaksanaan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat Desa b. Menunjukkan contoh dalam pelaksanaan keputusan pembangunan desa c. Meningkatkan pengetahuan dan penyuluhan di desa d. Kepeloporan dan kepedulian terhadap pemeliharaan hasil-hasil pembangunan desa 	Ordinal
		5.Pelaksana Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyerap aspirasi masyarakat b. Pemabanguna n partisipatif c. Pembangunan yang tepat sasaran 	Ordinal

Sumber : Modifikasi Penulis, 2018.

F. Teknik Pengukuran

untuk mempermudah menganalisis data, maka penilaian terhadap pelaksanaan variabel atau indikator dibagi dalam tiga tingkatan atau variasi, adapun penilaian tersebut adalah: Berperan, Cukup Berperan, Kurang Berperan. Pengukuran yang dipergunakan dalam menganalisa adalah menggunakan penelitian secara persentase, yaitu untuk kategori berperan persentase $\geq 67\%$ untuk kategori cukup berperan antara 34-66% sedangkan kategori kurang berperan $\leq 33\%$. Untuk lebih jelasnya dibuat pengukuran tabel sebagai berikut:

1. Stabilisator

Berperan : Apabila stabilisator yang dilakukan Kepala Desa mengenai perencanaan pembangunan berada pada kategori $\geq 67\%$

Kurang Berperan : Apabila stabilisator yang dilakukan oleh Kepala Desa mengenai perencanaan pembangunan desa berada pada kategori 34-66%

Tidak Berperan : Apabila stabilisator yang dilakukan oleh Kepala Desa mengenai perencanaan pembangunan berada pada kategori $\leq 33\%$

2. Inovator

Berperan : Apabila inovator yang dilakukan oleh Kepala Desa mengenai perencanaan pembangunan berada pada kategori $\geq 67\%$

Kurang Berperan : Apabila inovator yang dilakukan oleh Kepala Desa mengenai perencanaan pembangunan berada pada kategori $\leq 34-66\%$

Tidak Berperan : Apabila inovator yang dilakukan oleh Kepala Desa mengenai perencanaan pembangunan berada pada kategori $\leq 33\%$

3. Modernisator

Berperan : Apabila Modernisator yang dilakukan Kepala Desa mengenai Perencanaan Pembangunan Di Desa Berada pada Kategori $\geq 67\%$

Kurang Berperan : Apabila Modernisator yang dilakukan Kepala Desa mengenai perencanaan Pembangunan Berada Pada Kategori $\leq 34-66\%$

Tidak Berperan : Apabila modernisator yang dilakukan Kepala Desa mengenai Perencanaan Pembangunan Desa Berada Pada Kategori $\leq 33\%$

4. Pelopor

Berperan : Apabila pelopor yang dilakukan oleh Kepala Desa mengenai perencanaan pembangunan berada pada kategori $\geq 67\%$

Kurang Berperan : Apabila pelopor yang dilakukan oleh Kepala Desa mengenai perencanaan pembangunan berada pada kategori 34-66%

Tidak Berperan : Apabila pelopor yang dilakukan oleh Kepala Desa mengenai perencanaan pembangunan berada pada kategori $\leq 33\%$

5. Pelaksana Sendiri

Berperan : Apabila Sebagai Pelaksana Sendiri yang dilakukan Kepala Desa mengenai Perencanaan Pembangunan Desa Berada Pada Kategori $\geq 67\%$

Kurang berperan : Apabila sebagai Pelaksana Sendiri yang Dilakukan Kepala Desa Mengenai Perencanaan Pembangunan Desa Berada pada kategori $\leq 34-66\%$

Tidak Berperan : Apabila sebagai Pelaksana Sendiri yang dilakukan Kepala Desa Mengenai Perencanaan Pembangunan Desa Berada pada Kategori $\leq 33\%$

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan dengan cara survey serta menggunakan metode penelitian kuantitatif. Deskriptif dapat di artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selediki dengan menggambarkan keadaan subyek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tanpa sebagai mana adanya.

Penelitian Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, di gunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah di tetapkan.

Sedangkan survey adalah cara yang dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh fakta-fakta dan gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual, baik tentang situasi sosial, ekonomi, politik dari suatu kelompok atau suatu daerah .

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan peneliti memilih lokasi Desa Gunung Melintang dikarenakan pembangunan di Desa yang dimaksud tergolong cukup lamban di bandingkan Desa di sekitarnya dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

C. Populasi Dan Sampel

Menurut Dr. Suhasimi Arikunto (2010:173) Populasi adalah keseluruhan subjek peneliti. Sedangkan menurut Seorjono Soekanto populasi yakni sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.

Selanjutnya Sampel Menurut Usman dan Akbar (2011;43) ialah sebagian anggota populasi yang di ambil menggunakan teknik tertentu yang sebut teknik sampling.

Adapun populasi dalam Penelitian ini adalah mencakup Kepala Desa Gunung Melintang berjumlah 1 orang. Sekertaris Desa Gunung Melintang berjumlah 1 orang. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah 3 orang dari 5 orang lembaga RT dan RW berjumlah 5 orang dari 10 orang dan Masyarakat umum per Kepala Keluarganya berjumlah 36 Kepala Keluarga dari jumlah Kepala Keluarga 320 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya perincian populasi dan sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel III. I: Daftar populasi dan sampel mengenai Peranan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat di bidang pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuatan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Sub Populasi	Populasi	Responden	Persentase
1	Kepala Desa Gunung Melintang	1	1	100%
2	Sekteratis Desa Gunung Melintang	1	1	100%
3	Anggota BPD Desa Gunung Melintang	5	3	60%
4	RT dan RW	10	5	50%
5	Tokoh Masyarakat	10	5	50%
6	Masyarakat Umum (KK)	320	36	11,25%

Sumbe: kantor Kepala Desa, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan teknik penarikan sampelyaitu “sensus”, “Random Sampling”, “purposive sampling”, dimana teknik “sensus” digunakan untuk Kepala Desa Gunung Melintang dan sekretaris Desa menggunakan metode wawancara karena jumlah populasi yang sedikit, kemudia penulis menggunakan teknik “Random Sampling” untuk menentukan anggota BPD, RT dan RW serta Tokoh Masyarakat. Dan penulis menggunakan teknik “purposive sampling” untuk menentukan sampel Masyarakat Umum dikarenakan jumlahnya yang cukup besar.

E. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan jenis dan sumber data dengan dua cara yaitu:

- 1). Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2). Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka yang diperlukan untuk mendukung data primer.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yaitu:

1) Observasi

yaitu cara pengumpulan data yang berdasarkan atas tinjauan dan pengamatan penelitian secara

a langsung terhadap aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan

2) Quisioner

Yaitu memberikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya yang di isi oleh responden yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik ini untuk memperoleh data dari masyarakat umum dikarenakan jumlah yang cukup banyak dan dianggap lebih efektif.

3) Wawancara

Wawancara biasanya dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang (yang lazim disebut responden). Dengan berbicara langsung (face to face) dengan orang tersebut.(Suyanto,2005;69).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik ini untuk memperoleh data dari Kepala Desa Gunung Melintang, Sekretaris Desa Gunung Melintang Dan anggota BPD Desa Gunung Melintang.. ini dikarenakan jumlahnya sangat sedikit sehingga di anggap lebih efektif..

4) Dokumentasi

Yaitu salah satu teknik pengambilan data yang menggunakan dokumentasi-dokumentasi baik dari buku-buku maupun gambaran jelas tentang daerah penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Maka setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, data tersebut di kelompokkan menurut indikator beserta variabelnya. Kemudian data di analisis secara Kuantitatif yang dilengkapi dengan data persentase (%) berikut penjelasannya, serta di analisa secara deskriptif berdasarkan temuan-temuan dilapangan yang didapatkan dari angket, wawancara dan pengamatan langsung mengenai penelitian ini sehingga dapat memecahkan masalah dalam peranan kepala desa dalam mendorong partisipasi masyarakat di bidang pembangunan di desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Desa Gunung Melintang

Pada masa dahulu Desa Gunung Melintang mulanya hanya berupa hutan belukar atau rimba namun berangsur angsur datanglah masyarakat dari Hilir Sungai Ili seperti Bukit limpato Koto Inuman kemudian berladang Padi bermukim ditempat tersebut hanya menginap beberapa bulan kemudian dan mereka membuka lahan kembali.

Sekitar tahun 1771 barulah ada masyarakat yang bermukim di Gunung Melintang. Nama Gunung Melintang adalah pegunungan yang terletak antara garis lintang selatan-utara dan belum jelas asal usulnya dan siapa yang memberi nama Gunung Melintang tersebut. Ada sebagian tokoh masyarakat yang mengatakan adanya bukit yang melintang dan di atasnya terdapat makam sejarah yang di sebut Ninik Kuburan Panjang atau di sebut (DATUK PADUKO AJO SARI) yang pada zaman itu di percaya bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat desa Gunung Melintang dan datuk tersebut berasal dari Minang Kabau dan berlayar ke Jambi dan kemudian berlayar lagi ke sungai Indragiri menuju ke Inuman Bukit limpato dan melanjutkan perjalanan ke Gunung Melintang. Semasa beliau hidup, beliau mulai mendirikan dusun sehingga terbentuklah Dusun Gunung Melintang dan beliau wafat sekitar Tahun 1881. Beliau meninggal di sebabkan oleh senjatanya sendiri dan kelemahan tersebut di ketahui oleh anak tirinya karna senjatanya tersebut yang mampan

untuk membunuhnya sehingga beliau terbunuh dengan cara kepala yang terpisah karna beliau memiliki ilmu kebatinan Badan dan kepala beliau di kuburkan secara terpisah sedangkan badannya di makam kan di gunung melintang kepalanya di makam kan di pulau Bayur Cerenti. dan sampai saat sekarang ini masyarakat Desa gunung Melintang masih banyak berziarah tiap tahunnya dg cara memotong kambing dan berdoa bersama di tempat makamnya dalam rangka memperingati hari jadi Desa Gunung Melintang.

Pada tahun 1882datanglah pemuka adat dari Minang Kabau Luak Tanah Datar Pagaruyung sebanyak 50 orang tiba di rantau jadi Raja ,tiba luak jadi pengulu .maka dari itu kami gunung melintang termasuk luak nan sambilan Logas Tanah Darat dan Gunung Melintang di namakan luak nan barompek, Logas Tanah Darat di namakan luak nan balimo adapun Gunung Melintang terdiri panghulu nan barompek .

1. Keadaan Geografis Desa Gunung Melintang

Jarak tempuh antara Desa Gunung Melintang Dengan Kecamatan Kuantan hilir adalah 9 km yang di tempuh dalam waktu sekitar 30 menit, sedangkan jarak dengan kota Kabupaten Kuantan Singingi adalah 60 km yang di tempuh dalam waktu 1,5 jam.

Mengenai luas wilayah Desa Gunung Melintang memiliki luas 1022 hektar, dengan rincian luas wilayah sebagai berikut:

- Pemukiman : 350 hektar
- Pertanian atau Perkebunan : 950 hektar

- Rawa-rawa : 11 hektar
- Perkantoran : 0,27 hektar
- Sekolah : 0,57 hektar
- Jalan : 10 hektar
- Lapangan sepak Bola : 0,89 hektar

Sedangkan mengenai batas wilayah Desa Gunung Melintang sendiri adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Lubuk Kembang Bungo Kec.Ukui
- Sebelah Selatan : Desa Sigaruntang Kec.Inuman
- Sebelah Barat : Desa Dusun Tuo-Teratak Baru Kec.Kuantan Hilir
- Sebelah Timur : Desa Pesikaian Kec.Cerenti

B. Keadaan Penduduk Desa Gunung Melintang

Penduduk merupakan suatu komponen yang berada dalam suatu wilayah daerah tertentu dan juga faktor dominan dalam pembangunan suatu wilayah, termasuk sumber daya manusia maka pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan bisa memberikan kesejahteraan masyarakat sehingga hasil pembangunan tersebut dapat memberikan mamfaat kepada masyarakat. Dari data yang didapat dari monografi Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan singingi pada tahun 2018, berdasarkan jenis kelamin penduduk Desa Gunung melintang berjumlah 1.057 jiwa, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	519
2	Perempuan	538
Jumlah		1.057

Sumber ; Kantor Kepala Desa, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak di bandingkan penduduk laki-laki. Berarti terdapat perbedaan jumlah pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Gunung Melintang.

C. Mata Pencarian Masyarakat Desa Gunung Melintang

Mencari nafkah merupakan kebutuhan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencarian di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan singingi cukup beraneka ragam namun sebagian besar masyarakat adalah bertani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	451
2	Buruh	90
3	Pedagang	15
4	Swasta	75
5	Sopir angkutan	12
6	Guru	6
7	PNS	2
Jumlah		651

Sumber: Kantor Kepala Desa Gunung Melintang, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan mata pencariannya, dimana penduduk dengan mata pencarian sebagai petani lebih banyak yaitu berjumlah 451 orang sedangkan mata pencarian yang paling sedikit sebagai PNS yaitu berjumlah 2 orang.

1. Pendidikan

Pendidikan di Desa Gunung Melintang pada umumnya sudah lumayan baik, hal ini dapat dilihat dengan sedikitnya penduduk yang buta huruf. Walaupun masih ada di jumpai penduduk yang tidak tamat SD berasal dari penduduk 50 tahun ke atas, di sebabkan pada zaman mereka sulit untuk sekolah karena keterbatasan biaya, fasilitas sekolah juga masih sangat kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3 : Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD	297
2	SLTP atau MTS	59
3	Putus Sekolah	57
4	SLTA atau MA	25
5	Buta Huruf	17
6	S1 atau Diploma	2
Jumlah		457

Sumber: Kantor Kepala Desa Gunung Melintang, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat penduduk yang paling banyak adalah tamatan SD yaitu berjumlah 297 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah tamatan sarjana atau diploma berjumlah 2 orang, dan jumlah penduduk yang buta huruf berjumlah 17 orang.

2. Agama

Negara Republik Indonesia menjamin setiap warga negaranya memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana telah disebutkan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa warga Negara Indonesia berhak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing., oleh karena itu kehidupan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mayoritas menganut agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.4 : Jumlah penduduk berdasarkan agama

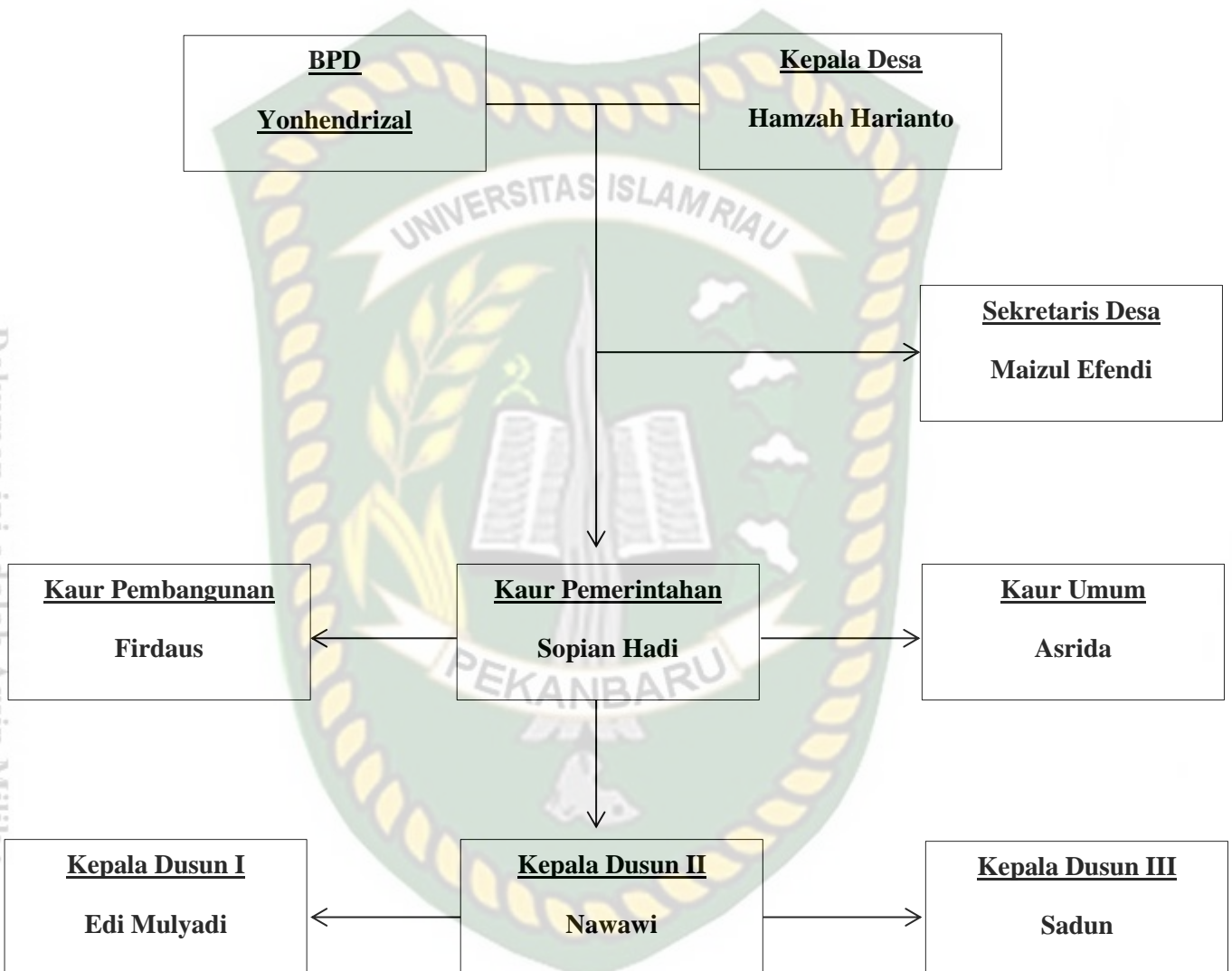
No	Agama	Jumlah
1	Islam	1.056
2	Katolik	0
3	Kristen	1
4	Hindu	0
5	Budha	0
Jumlah		1.057

Sumber : Kantor Kepala Desa Gunung Melintang, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Gunung Melintang berdasarkan agama atau kepercayaan yang mana penduduk yang mayoritas nya merupakan beragama islam yang berjumlah 1.056 orang sedangkan yag beragama kristen berjumlah 1 orang.

D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gunung Melintang
Kecamatan Kauntan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber : Kantor Kepala Desa Gunung Melintang, 2019

1. Kepala Desa

a. Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan
2. Menyelenggarakan urusan pembangunan
3. Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan

b. Kepala Desa mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
4. Menetapkan peraturan Desa
5. Menetapkan anggaran pendapatan Desa
6. Membina kehidupan Desa
7. Membina kehidupan Masyarakat Desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perrekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara Partisipatif.

14. Mewakili Desa didalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undnagan.

2. SekretarisDesa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf membantu Kepala Desa memimpin. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud memimpin dan menjalankan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

a. Sekretaris Desa mempunyai Tugas:

1. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa
2. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua unsur atau kegiatan Sekretaris Desa
3. Merumuskan kegiatan Kepala Desa
4. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa
5. Menyusun rencana APBDES
6. Melaksanakan administrasi keuangan
7. Melaksanakan administarsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

8. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan tugas kesekretariatan.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

3. Kepala Urusan Pemeritahan adalah membantu Sekretaris Desa dengan tugas:

1. Kegiatan administarsi kependudukan dan catatan sipil
2. Kegiatan administarsi pertanahan
3. Pencatatan administrasi Dsea
4. Kegiatan ketentraman dan ketertiban pertanahan sipil
5. Penyelenggaraan buku administrasi peraturan Desa dan keputusan Desa
6. Tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

4. Kepala urusan pembangunan adalah membantu sekretaris Desa dengan tugas:

1. Kegiatan administrasi pembangunan Desa
2. Pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa
3. Menghimpun, menganalisa dan memelihara potensi Desa
4. Mencatat dan mempersiapkan badan usulan kegiatan pembangunan Desa
5. Tugas-tugas lain yang diberikan atasan

5. Kepala Urusan Umum adalah membantu Sekretaris Desa dengan Tugas:

1. Melaksanakan tata kearsipan pengendalian surat masuk dan keluar

2. Mempersiapkan dan mencatat hasil rapat atau persidangan dan naskah lainnya
3. Memelihara, mendistribusikan dan menyimpan alat-alat tulis dan peralatan kantor
4. Pelaksanaan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik Desa
5. Pengelolaan administrasi kepegawaian aparat Desa
6. Pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
7. Mempersiapkan penerimaan tamu kedinasan di Desa
8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang tidak di urus oleh urusan lainnya

6. Kepala Urusan Keuangan adalah membantu Sekretaris Desa dengan Tugas:

1. Tugas pokok: membantu Sekretaris Desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa mempersiapkan bahan penyusun APBDes
2. Fungsi: pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa, persiapan bahan penyusun.

7. Kepala Urusan Kemasyarakatan Desa adalah membantu Sekretaris Desa dengan tugas dan fungsi:

1. Tugas kaur kemasyarakatan ialah Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan.
2. Fungsi kaur kemasyarakatan ialah penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan, penyiapan dan pelaksanaan perkembangan kehidupan beragam, penyiapan dan pelaksanaan perkembangan kehidupan beragam.

8. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah pelaksanaan tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala dusun di angkat dan diberhentikan oleh Camat atas saran yang di usulkan Kepala Desa.

1. Tugas Kepala Desa adalah sebagai membentuk pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayahnya.
2. Tugas Kepala Desa adalah melakukan tugas diwilayah kerjanya
3. Fungsi kepala Dusun:
 - a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa
 - b) Melaksanakan keputusan Desa diwilayah kerjanya
 - c) Melaksanakan kebijakan Kepala Desa

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Responden

Tahap awal dari uraian di atas BAB V ini penulis perlu untuk menjelaskan identitas dari para responden, oleh karena tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi peneliti yang diberikan para responden. Adapun identitas yang akan dibahas pada penelitian dibawah ini adalah:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Tabel V.1 : Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-laki	18	50%
2	Perempuan	18	50%
	Jumlah	36	100%

Sumber: Data olahan Lapangan

Pada tabel V.1 di atas dapat dilihat bahwa responden penelitian tentang Peranan Kepala Desa dalam Mendorong Masyarakat di Bidang Pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada yang dominan yaitu laki-laki 18 orang dan responden perempuan sebanyak 18 orang.

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan responden yang dijadikan sampel pada penelitian mengenai Peranan Kepala Desa dalam Mendorong Masyarakat di Bidang Pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.2 : Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	SD	10	28%
2	SMP	11	30,5%
3	SMA	13	36%
4	D3	-	-
5	S1	2	5,5%
Jumlah		36	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2019

Dari tabel V.2 di atas dapat di jelaskan bahwa tingkat pendidikan responden di dominasi oleh SMA yaitu sebanyak 13 orang dan di ikuti SMP 11 orang dan SD 10 orang serta S1 sebanyak 2 orang.

3. Berdasarkan Tingkat Umur Responden

umur dapat memberikan pengaruh kemampuan dari seseorang dalam menilai dan memutuskan suatu permasalahan dengan jalan pikiran yang lebih matang dan lebih bijak. Adapun tingkat umur responden dalam penelitian Peranan

Kepala Desa dalam mendorong Masyarakat di bidang Pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan kuntan Hilir Kabupaten Kuantan singingi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.3 : Tingkat Umur Responden

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase %
1	20-30	6	17%
2	31-40	12	33%
3	41-50	18	50%
Jumlah		36	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2019

Berdasarkan tabel V3 di atas, dapat dijelaskan bahwa responden yang berumur 20-30 berjumlah 6 orang 17% responden yang berumur dari 31-40 berjumlah 12 orang atau 33% , responden yang berumur 41-50 berjumlah 50%. Dan uraian tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian respoden berumur 41-50 tahun.

B. Peranan Kepala Desa dalam Mendorong Masyarakat di Bidang Pembangunan

Kepala Desa di tuntut untuk melaksanakan fungsinya sebagai fasilitator, pelopor, dan inovator dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi maupun kesejahteraan masayarakat Desa. Sebagai penanggung jawab dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat maka pemerintah dituntut memberikan fasilitas serta kemudahan untuk menciptakan dan mendorong sebagai

langkah nyata. Agar masyarakat dapat memperbaiki taraf hidup mereka menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, dan dalam menyelenggarakan pemerintahannya tersebut tidak lepas dari tugas Kepala Desa dalam melaksanakan program-program pembangunan, serta meningkatkan dorongan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Dengan hal tersebut maka penulis sajikan hasil penelitian tentang Peranan Kepala Desa Dalam Mendorong Masyarakat di Bidang Pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir kabupaten Kuantan Singingi:

1. Peranan Kepala sebagai stabilitor dalam mendorong mendorong Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan singingi

Dalam melakukan pemabangunan di Desa Gunung Melintang Kepala Desa harus melakukan dorongan terhadap masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan yang lainnya, sehingga pembangunan yang di harapkan dan di rencanakan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tentunya Kepala Desa dibantu oleh perangkat-perangkat Desa lainnya, serta pihak yang berkompeten dalam kegiatan pembangunan baik itu BPD maupun LKMD. Tanpa adanya koordinasi antara Kepala Desa dan masyarakat maupun pihak-pihak berkompeten maka pembangunan yang direncanakan tidak akan berjalan dengan baik.

Untuk mengetahui tanggapan responden penelitian tentang Peranan Kepala Desa dalam Mendorong partisipasi Masyarakat Di bidang Pembangunan Di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel V.4 : Distribusi Penilaian Tentang Indikator Stabilitator pada penilaian Peranan Kepala Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	
1	Menjaga dan memelihara kerukunan, keamanan ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa	17	19	-	36
2	Meningkatkan pemabngunan Desa	18	18	-	36
3	Menjaga dan memelihara hasil pembangunan Desa	20	16	-	36
4	Meningkatkan sosial masyarakat	17	19	-	36
Jumlah		72	72	-	144
Rata-rata		18	18	-	36
Persentase		50%	50%	-	100%

Sumber: Data Olahan lapangan, 2019

Berdasarkan tabel V.5 dapat dilihat bahwa hasil tanggapan responden penelitian mengenai indikator stabilitator pada penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Mendorong Masyarakat di Bidang Pembangunan Di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir. Adapun item pertama responden yang menyatakan berperan sebanyak 17 responden dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 19 orang responden kemudian, pada item penilaian kedua responden yang menyatakan berperan sebanyak 18 responden dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 18 orang responden dan pada item penilaian ketiga yang menyatakan berperan sebanyak 20 orang responden dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 16 orang responden kemudian, yang terakhir pada item penilaian ke empat yang menyatakan berperan sebanyak 17 orang responden dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 19 orang responden. Kemudian pada persentasenya yang berperan sebanyak 50% dan yang kurang berperan sebanyak 40% dan yang tidak berperan 0%.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan penulis masih menemukan kejanggalan akan peranan Kepala Desa dalam memelihara hasil pembanguna yang telah ada hal itu dapat di dilihat dari masih banyak pembangunan yang tidak tepat sasaran atau yang lebih jelas tidak jelas kegunaanya hal ini dikarenakan pembangunan tersebut kurang melibatkan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan yang di butuhkan masyarakat desa. Maka dari hal tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, peranaan Kepala Desa sebagai stabilitator belum terlaksana dengan baik, hal itu dapat dilihat dari hasil persentase pada item kurang berperan sebanyak 50%.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gunung Melintang, tanggal 03 Maret 2019 bahwa, “ Kepala Desa untuk saat ini akan berupaya dalam meningkatkan kesetabilan perekonomian masyarakat Desa, serta keamanan di Desa yang tentunya kedua hal tersebut berpengaruh terhadap kelancaran berjalannya pembangunan yang ada di Desa, dan Kepala Desa akan mengkoordinasikan hal tersebut dengan pihak-pihak terkait yang ada di Desa tanpa terkecuali melibatkan masyarakat Desa Gunung Melintang sendiri.”

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Gunung Melintang, tanggal 05 maret 2019 bahwa “ Ketua berserta anggota akan bekerja sama dengan Kepala Desa untuk meningkatkan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa, dan Ketua BPD akan menyaring dan mendengarkan semua aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat Desa Gunung Melintang kedepannya demi kelancaran program pembangunan yang telah di rencanakan”.

Dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat Desa Gunung Melintang yang bernama Dian pada tanggal 05 Maret 2019 menyatakan bahwa “ Sejauh ini yang saya ketahui sebagai masyarakat Pemerintahan Desa belum membuat program kebersihan yang ada di Desa, jadi masyarakat Gunung Melintang biasanya membuang sampah kebelakang rumah masing-masing di karenakan jarak dari rumah kerumah itu masih berjauhan atau terkadang juga ada sebagian masyarakat yang membuang sampah ke sungai hal ini tentunya akan mencemari air sungai, untuk kedepannya saya sebagai

masyarakat berharap pemerintah Desa segera membuat program kebersihan atau berupa TPA atau semacamnya”.

Serta berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Se kretaris Desa Gunung Melintang pada tanggal 05 Maret 2019 menyatakan bahwa “ sementara ini pemerintah Desa sendiri masih berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan program-program yang sudah di rencanakan, dan hal ini tentu tidak terlepas dari pembinaan dari pihak kecamatan untuk menyusun program yang tepat dalam meningkatkan kesejahreaan sosial masyarakat Desa Gunung Melintang sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara serta kuisisioner yang telah penulis sebarakan serta dengan di dukung oleh dokumentasi maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan Kepala Desa Sebagai stabilisator tergolong dalam kata kurang berperan di karenakan masih banyak nya pembangunan yang kurang tepat sasaran dan juga pelibatan masyarakat Desa Gunung Melintang dalam program pembangunan, maka dari itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan aparatur Desa Gunung Melintang sendiri untuk kedepannya akan melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan akan menjaga kesetabilan politik demi menjaga kelancaran pembangunan, serta menjaga hasil pembangunan yang ada di Desa Gunung Melintang sendiri.

2. Peranan Kepala Desa sebagai Inovator dalam pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Kepala Desa merupakan ujung tombak bagi Pemerintahan Desa, memberikan pelayanan umum serta untuk menyampaikan program-program pemerintah, baik di bidang pembangunan maupun sosial ekonomi. Untuk itu Kepala Desa sudah selayaknya menyelenggarakan administrasi yang efektif agar pelayanan umum kepada masyarakat dengan seadil-adilnya. Dan dalam melaksanakan program pembangunan seorang Kepala Desa di harapkan mempunyai inovasi-inovasi baru dan mampu mengajak warganya untuk bekerja sama dalam program pembangunan yang ada di Desa.

Untuk mengetahui tanggapan responden penelitian tentang indikator Inovator pada Penelitian tentang Peranan Kepala Desa dalam Mendorong partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel V.5 Distribusi Penelitian Responden Tentang Indikator Kepala Desa Sebagai Inovator pada penilaian Peranan Kepala Desa dalam mendorong Partisipasi Masyarakat di Bidang pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	
1	Pembaruan program pembangunan desa dalam bentuk ide, saran pendapat dan masukan untuk pembangunan	15	19	2	36

1	2	3	4	5	6
2	Pembaharuan metode sistem kinerja pemerintahan Desa	18	18	-	36
Jumlah		34	37	2	72
Rata-rata		17	18	1	36
Persentase		47%	50%	3%	100%

Pada tabel V.5 di atas dapat dijelaskan bahwa pada indikator inovator pada item pertama jumlah responden yang menyatakan berperan berjumlah sebanyak 15 orang dan responden yang menyatakan kurang berperan sebanyak 19 orang serta yang menyatakan tidak berperan sebanyak 2 orang responden, kemudian pada item penilaian kedua reponden yang menyatakan berperan sebanyak 18 orang dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 18 orang serta tidak ada responden yang menyatakan tidak berperan, maka jika di persentasekan jumlah respondenn yang menyatakan berperan sebanyak 47% dana yang menyatakan kurang berperan sebanyak 50% serta yang menyatakan tidak berperan sebanyak 3% responden. Dari hal tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa peranan Kepala Desa pada indikator inovator “Kurang Berperan”.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan maka penulis mendapatkan bahwa masih kurangnya masukan, ide, maupun saran baik itu datang dari Pemerintahan Desa maupun dari masyarakat Desa sendiri hal ini di perkuat dengan hasil wawancara penulis sendiri dari salah seorang masyarakat Desa Gunung Melintang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat Desa Gunung Melintang yang bernama Ahmad Wahyudi S.Pd pada tanggal 03 Maret 2019 menyatakan bahwa “ Untuk sementara ini ide maupun saran dari

masyarakat maupun dari pemerintah Desa sendiri masih kurang, dengan kurangnya masukan maupun saran ini maka masih banyak terdapatnya pembangunan yang kurang tepat sasaran karena kurang aspirasi masyarakat, maka dari itu untuk kedepannya saya sebagai masyarakat sendiri mengharapkan dalam setiap program pembangunan harus melibatkan masyarakat Desa, karena tanpa masukan dari masyarakat sendiri maka pembangunan yang berkelanjutan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan”.

Sementara itu berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Gunung Melintang pada tanggal 03 maret 2019 menyatakan bahwa” untuk kedepannya Kepala Desa beserta aparaturnya akan bekerja sama dengan anggota BPD serta masyarakat Desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan serta lebih menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat demi kelancaran pembangunan sesuai dengan yang diharapkan, dan tentunya akan meningkatkan sistem kerja dari pemerintah Desa”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat Desa Gunung Melintang Serta dengan Kepala Desa Gunung Melintang di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa saran maupun ide dalam pembangunan masih kurang hal tersebut dapat dilihat masih banyak pembangunan yang kurang tepat sasaran atau tidak sesuai dengan pembangunan yang di butuhkan masyarakat hal ini berkaitan dengan pelibatan masyarakat dalam pembangunan masih kurang, serta berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa maka kedepannya aparaturnya akan melakukan inovasi dalam pembangunan dan bekerja sama dengan masyarakat serta aparaturnya Desa lainnya.

3. Peranan kepala desa Sebagai Modernisator dalam Pembangunan di Desa Gunung melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan singingi

Dalam peranan selaku modernisator Kepala Desa di harapkan memiliki pola pemikiran yang maju dan tidak selalu berpatokan kepada padangan lama, seornag Kepala desa harus mampu mengubah pola pemikiran yang medern untuk mencapai tujuan pemabangunan yang ada di Desa dan sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat, dan harus mampu membuat perencanaan pembangunan di Desa pada bidang-bidang yang sesuai kondisi, budaya dan perekonomian masyarakat. Perencanaan pemabngunan tersebut harus terarah, rasional, luas dan berketepatan waktu yang keseluruhannya di tujukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

Untuk mengetahui tanggapan responden penelitian tentang indikator modernisator pada Penelitian tentang Peranan Kepala Desa dalam Mendorong partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel V.6 : Distribusi Penilaian Responden pada indikator Modernisator tentang penelitian Peranan Kepala Desa dalam Mendorong Partisipasi masyarakat di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir kabupaten Kuantan singingi.

No	Item Penilaian	Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	Jumlah
1	Modernisasi dalam Pembangunan	17	19	-	36
2	Misi Pembangunan yang Jelas dan berpandangan maju	15	21	-	36
Jumlah		32	40	-	72
Rata-rata		16	20	-	36
Persentase		44%	56%	-	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2019

Dari tabel V.6 di atas dapat di jelaskan bahwa pada indikator Modernisator pada item penilaian pertama responden yang menyatakan berperan sebanyak 17 orang responden, sementara yang menyatakan kurang berperan sebanyak 19 orang responden, kemudian pada item penilaian kedua yang menyatakan berperan sebanyak 15 orang responden dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 21 orang responden. Yang mana jika di persentasekan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 44% responden dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 56% responden. Dari hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa Peranan Kepala Desa Sebagai Modernisator dalam pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuntan Hilir Kabupaten Kuantan singingi adalah “Kurang Berperan”

Dari observasi di lapangan yang penulis lakukan bahwa alasan responden yang menyatakan Kepala Desa kurang berperan pada item penilaian pertama adalah kepala Desa belum melakukan modernisasi dalam pembangunan yang ada di Desa modernisasi pembangunan yang dimaksud disini adalah pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang bisa menunjang kesejahteraan masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat, dan pada item penilaian kedua alasan responden yang menyatakan Kepala Desa kurang berperan adalah pembangunan yang dilakukan Kepala Desa masih ada terdapat pembangunan yang kurang tepat lokasi pemabangunannya dan tidak jelas kegunaannya contohnya saja adalah lokasi pembangunan WC umum yang dibangun di pinggiran sungai, yang mana masyarakat lebih memilih untuk buang hajat kesungai, dan hasilnya pembangunan tersebut tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari analisa penulis sendiri pembangunan yang tidak tepat sasaran tersebut terjadi karena Pemerintah Desa kurang melibatkan masyarakat serta kurang mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat Desa Gunung Melintang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Gunung Melintang pada tanggal 15 Oktober 2019 .”sejauh ini memang program-program pembangunan yang berkaitan dengan modernisasi belum terlaksana dengan benar hal ini dikarenakan kita masih kekurangan sumber daya aparatur yang memadai untuk menunjang pembangunan yang mengarah pada modernisasi selain itu kita perlu berupa pelatihan untuk memulai semua itu kedepannya”.

4. Peranan Kepala Desa sebagai Pelopor dalam Pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kauntan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Pemerintahan Desa merupakan salah satu subjek yang juga amendapatkan perhatian seekaligus, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Meningkatkan program-program yang ada di Desa adalah untuk meningkatkan pembangunan perdesaan.

Maka dari itu agar tercapainya program pembangunan yang sesuai skala prioritas diharapkan Kepala Desa sebagai seorang pemimpin mampu untuk mendorong masyarakat untuk ikut dalam pembangunan yang ada di Desa, sebagai seorang pelopor atau contoh yang baik bagi masyarakatnya. Kepala Desa bukan saja hanya sebagai penggerak pembangunan di Desa akan tetapi juga menjadi figur dalam menjaga hasil-hasil dari pembangunan yang sudah terlaksana.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden penelitian tentang indikator pelopor dalam penelitian Peranan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir kabupaten Kauntan Singingi dapat di perhatikan pada tabel berikut:

Tabel V.7 : Distribusi Penilaian Responden pada indikator Pelopor tentang penelitian Peranan Kepala Desa dalam Mendorong Partisipasi masyarakat di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir kabupaten Kuantan singingi.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	
1	Menunjukkan contoh dalam pelaksanaan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat Desa	19	17	-	36
2	Menunjukkan contoh dalam pelaksanaan keputusan pembangunan Desa	18	20	-	36
3	Meningkatkan pengetahuan dan penyuluhan di Desa	16	19	1	36
4	Kepeloporan dan kepedulian terhadap pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di Desa	15	20	1	36
Jumlah		68	76	2	144
Rata-rata		17	19	0,5	36
Persentase		47%	53%	1%	100%

Sumber: Data olahan lapangan, 2019.

Dari tabel V.7 di atas dapat di jelaskan bahwa pada indiaktor pelopor responden pada item penilaian pertama yang menyatakan berperan sebanyak 19 orang dan responden yang menyatakan kurang berperan sebanyak 17 orang

responden, kemudian pada item penilaian kedua responden yang menyatakan berperan sebanyak 18 orang dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 20 orang responde, selanjutnya pada item penilaian ketiga responden yang menyatakan berperan sebanyak 16 orang responden dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 19 orang responden dan yang menyatakan tidak berperran sebanyak 1 orang responden, dan pada item penilian terakhir responden yang menyatakan berperan sebanyak 15 orang responden dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 20 orang responden dan responden yang menyatakan tidak berperan berjumlah 1 orang responden. Jika di persentasekan responden yang menyatakan berperan sebanyak 47% dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 53% kemudian yang menyatakan tidak berperan sebanyak 1%. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa pada indikator pelopor “kurang berperan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gunung Melintang pada tanggal 03 maret 2019 menyatakan bahwa “ untuk sementara ini untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan maka Pemerintah Desa sendiri sedang melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi tapi ini tentunya butuh proses dan kesadaran dari masyarakat, dalam pembinaan ini sendiri termasuk pembinaan dalam menjaga hasil-hasil pembangunan yang telah ada, dan di samping itu pemerintah Desa akan berupaya meningkatkan pelayanan Kepada masyarakat untuk menjaga kepercayaan masyarakat Kepada Pemerintah Desa”.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Gunung Melintang pada tanggal 05 Maret 2019 menyatakan bahwa “ Badan Pemusyawaratan Desa sendiri telah berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam melakukan pembinaan dan pegarahan kepada masyarakat tentang pentingnya keikutsertaan dalam pembangunan Desa, dan BPD akan lebih meningkatkan pelayanan dan menangkap aspirasi dari masyarakat Desa Gunung Melintang sendiri”.

Dan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Gunung Melintang pada tanggal 05 Maret 2019 menyatakan bahwa “ Masalah pelayanan di Desa Gunung Melintang sendiri sudah sedikit ada peningkatan dari pada sebelumnya yang agak berbelit dan tentunya kualitas pelayanan sendiri dipengaruhi oleh kualitas SDM aparatur Desa, dan tentunya kami sebagai pemerintah Desa akan terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Gunung Melintang yang bernama Handri Yanto pada tanggal 05 maret 2019 menyatakan bahwa “ terkait dengan masalah menjaga hasil pembangunan di Desa Gunung Melintang sendiri masih kurang, hal ini karena tingkat kesadaran dari masyrakat Desa masih minim akan arti penting menjaga hasil dari pembangunan yang ada, dan menurut saya hal tersebut juga tidak terlepas dari pengarahan yang masih kurang dari pemerintah Desa Gunung Melintang sendiri”.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan kuisisioner tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa peranan Kepala Desa sebagai pelopor dalam

pembangunan Desa masih kurang berperan hal tersebut dapat di lihat dari hasil wawancara bahwa salah satu masalah pembangunan yang terjadi di Desa Gunung Melintang sendiri adalah masalah pemeliharaan pembangunan yang telah ada hal tersebut masih kurangnya pembinaan dari pemerintahan Desa maupun dari tingkat kesadaran masyarakat Desa sendiri akan arti pentingnya menjaga hasil pembangunan tersebut.

5. Peranan Kepala Desa sebagai Pelaksana Sendiri dalam Pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan ke arah kemajuan yang lebih baik. Keberhasilan atau kegagalan peningkatan pembangunan di desa sangat di tentukan oleh kinerja Kepala Desa, sejauh mana Kepala Desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian, serta pelaksanaan. Peran Kepala Desa dalam pembangunan wilayah pedesaan memiliki fungsi yang sangat strategis, sehingga kehadirannya dalam berbagai aktifitas tidak dapat di hindari lagi. Ini berarti pemimpin harus memiliki idealisme yang kuat, serta dia harus dapat menjelaskan cita-citanya kepada masyarakat dengan sejelas mungkin dan kemudian mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tersebut.

Untuk mengetahui tanggapan responden penelitian pada indikator sebagai pelaksana sendiri pada penelitian peranan Kepala Desa dalam mendorong

Partisipasi Masyarakat pada bidang Pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir kabupaten Kuantan singingi dapat di perhatikan pada tabel berikut:

Tabel V.8 : Distribusi Penilaian Responden pada indikator pelaksana sendiri tentang penelitian Peranan Kepala Desa dalam Mendorong Partisipasi masyarakat di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir kabupaten Kuantan singingi.

No	Item Penilaian	Kategori ukuran			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	
1	Melakukan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat	13	20	3	36
2	Melaksanakan pembangunan secara partisipatif	17	19	-	36
3	Pengawasan langsung terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan	20	16	-	36
Jumlah		50	55	3	108
Rata-rata		17	18	1	36
Persentase		47%	50%	3%	100%

Sumber: Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.8 di atas pada indikator sebagai pelaksana sendiri dapat di jelaskan bahwa pada item penilaian pertama responden yang menyatakan berperan sebanyak 13 responden dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 20 responden kemudian yang menyatakan tidak berperan sebanyak 3 responden. Selanjutnya, pada item penilaian kedua yang menyatakan berperan sebanyak 17 responden dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 19 responden dan pada item penilaian terakhir yang menyatakan berperan sebanyak 20 responden dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 16 responden yang mana jika di persentasekan yang menyatakan berperan sebanyak 47% responden dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 50% responden dan yang menyatakan tidak berperan sebanyak 1% responden.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di lapangan alasan responden menyatakan kurang berperan pada item penilaian pertama adalah Pemerintah Desa masih kurang menyerap aspirasi masyarakat sehingga masih adanya pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian, pada item penilaian kedua alasan responden menyatakan kurang berperan adalah Pemerintah Desa masih kurang memberikan informasi maupun arahan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di Desa, karena hal inilah masih terjadinya masalah rencana program pembangunan yang ada di Desa Gunung Melintang. Dan pada item penilaian terakhir alasan responden menyatakan Kepala Desa berperan adalah karena selama ini jika ada pembangunan yang ada di Desa, Kepala Desa akan turun langsung untuk mengawasi pembangunan yang sedang berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Gunung Melintang pada tanggal 15 Oktober 2019 “ kalau masalah pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sendiri sebenarnya ada miss komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat yaitu dimana kami sebagai pemerintah membangun sesuai dengan pengamatan dan analisa kami, kemudian jika masyarakat menganggap pembangunan tersebut tidak sesuai dengan yang di harapkan maka kami akan memberikan pengertian melalui ketua RT, RW maupun ketua Pemuda, kemudian masalah partisipasi sendiri kami telah memberikan arahan secara bertahap kepada masyarakat walaupun sekarang belum signifikan hasilnya tapi kami yakin untuk kedepannya akan semakin baik”.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan berikut ini akan penulis sajikan rekapitulasi penelitian yang dilakukan tentang Peranan Kepala Desa dalam Mendorong Masyarakat di Bidang Pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel V.9 : Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Mendorong Masyarakat di Bidang Pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan singingi.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Kurang Beperan	Tidak Berperan	
1	Stabilisator	18	18	-	36
2	Inovator	17	18	1	36

1	2	3	4	5	6
3	Modernisator	16	20	-	36
4	Pelopop	17	19	-	36
5	Pelaksana sendiri	17	18	1	36
Jumlah		85	93	2	180
Rata-rata		17	18,6	0,4	36
Persentase		47,22%	51,66%	1,11%	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2019.

Dari tabel V. diatas di ketahui tanggapan responden penelitian untuk 3 indikator mengenai penelitian Peranan Kepala Desa dalam Mendorong Masyarakat di Bidang Pembangunan di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Pada indikator pertama responden yang menyatakan berperan sebanyak 18 orang responden dan yang menyatakan kurang berperan 18 orang berperan, kemudian pada indikator kedua responden yang menyatakan berperan sebanyak 17 orang responden dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 18 responden dan yang dan yang menyatakan tidak berperan sebanyak 1 orang kemudian pada indikator ketiga yang menyatakan berperan sebanyak 16 orang dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 20 orang responden dan pada indikator ke empat responden yang menyatakan berperan sebanyak 17 responden dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 19 responden dan pada indikator terakhir yang menyatakan berperan sebanyak 17 responden dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 18 responden kemudian yang menyatakan tidak berperan sebanyak 1 responden. Jika di persentasekan yang responden menyatakan berperan sebanyak 47,22% dan yang menyatakan kurang berperan sebanyak 51,66% kemudian yang menyatakan tidak berperan sebanyak

1,11%. Dari hal tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa mengenai penelitian tentang Peranan Kepala Desa dalam Mendorong Masyarakat Di Bidang Pembangunan Di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat di simpulkan “kurang berperan” hal tersebut dapat di lihat dari persentase kurang berperan sebanyak 51,66%.

Hambatan-hambatan Peranan Kepala Desa Dalam Mendorong Masyarakat di Bidang Pembangunan Di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan hilir Kabupaten Kuantan singingi:

1. Kurangnya pembinaan atau sosialisasi dari Kepala Desa kepada masyarakat akan arti pentingnya keikutsertaan dalam pembangunan
2. Kurang terciptanya komunikasi antara Kepala Desa dan Masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan
3. Tingkat pendidikan aparatur Desa dan masyarakat Desa yang masih tergolong rendah
4. Kurang memberikan peran terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pembentukan panitia pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembangunan.
5. Kepala Desa masih kurang dalam pelaksanaan perannya sebagai stabilisator, inovator, dan pelopor dalam bidang pembangunan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua data serta uraian yang telah di bahas sebelumnya, maka penulis bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa Peranan Kepala Desa Dalam Mendorong Masyarakat Di Bidang Pembangunan Di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi “Kurang Berperan”. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta yang penulis temukan di lapangan bahwa masih kurangnya pelibatan masyarakat dalam pembangunan yang ada di Desa dengan adanya hal tersebut maka berdampak pada pembangunan yang kurang tepat sasaran atau tidak jelas kegunaannya contohnya pembangunan yang tidak jelas kegunaannya tersebut adalah pembangunan WC atau toilet yang di bangun di pinggiran sungai yang mana masyarakat sendiri lebih memilih untuk membuang hajat di sungai dari pada menggunakan WC yang di bangun tersebut, hal ini di karenakan juga lokasi pembangunan WC atau toilet tersebut kurang tepat, di samping itu juga masih kurangnya pembinaan yang di lakukan pemerintah Desa kepada masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan yang sudah ada dan tentunya hal ini juga di pengaruhi oleh pola fikir dan pendidikan masyarakat yang masih minim akan arti pentingnya menjaga hasil dari pembangunan yang ada. Di samping permasalahan ini yang menjadi Peranan Kepala Desa dalam Mendorong masyarakat di Bidang Pembangunan tergolong dalam kategori “Kurang Berperan” adalah masih rendahnya pendidikan dari aparatur pemerintahan di Desa Gunung Melintang

sehingga Program-program pemabangunan yang ada di Desa kurang berjalan dan terencana dengan baik dan kurang menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat.

Adapun data dan fakta yang mendukung penulis didalam melakukan Peranan Kepala Desa serta menarik kesimpulan tersebut di atas adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Mendorong Masyarakat Di Bidang Pembangunan Di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kurang Berperan.
2. Hambatan-hambatan Kepala Desa Dalam Mendorong Masyarakat di Bidang Pembangunan di Desa Gunung Melintang yaitu:
 - a. Kurangnya pembinaan atau sosialisasi dari Kepala Desa akan arti pentingnya keikutsertaan dalam pembangunan
 - b. Kurang terciptanya komunikasi antara Kepala Desa dan Masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan
 - c. Tingkat pendidikan aparatur Desa dan masyarakat yang masih tergolong rendah
 - d. Kurang memberikan peran terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pembentukan panitia pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembangunan
 - e. Kepala Desa masih kurang dalam pelaksanaan perannya sebagai stabilitator, inovator dan pelopor dalam pembangunan.

B. Saran

Adapun saran-saran maupun masukan yang dapat penulis berikan pada penelitian ini sehubungan dengan peranan Kepala Desa dalam Mendorong Masyarakat Di Bidang Pembangunan Di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai Berikut:

1. Di harapkan Kepala Desa mampu menciptakan dorongan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan Desa, karena dengan adanya hal tersebut maka program dan perencanaan pembangunan akan lancar dan tepat sasaran.
2. Di harapkan juga Kepala Desa memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang arti pentingnya keikutsertaan sehingga dengan adanya arahan-arahan tersebut untuk pelaksanaan pembangunan selanjutnya masyarakat akan ikut serta.
3. Serta Kepala Desa dan masyarakat dapat memelihara hasil pembangunan yang telah ada, karena dengan adanya pemeliharaan tersebut maka bisa di gunakan oleh generasi mendatang.
4. Di harapkan untuk kedepannya Kepala Desa beserta jajaran Pemerintahan Desa untuk lebih menyerap aspirasi-aspirasi yang di sampaikan masyarakat Desa dalam masalah pembangunan yang ada di Desa Gunung Melintang.

Daftar Tally Responden Masyarakat Umum Desa Gunung Melintang

Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Identitas Responden				Indikator														
Responden	U	Jk p		Stabilitator				Inovator		Modernisator		Pelopor				Pelaksana sendiri		
				1	2	3	4	1	2	1	2	1	2	3	4	1	2	3
1	33	L	SMA	B	B	A	B	B	B	A	B	B	B	B	A	B	B	A
2	28	P	SMP	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	A	A
3	48	L	SMA	A	A	B	B	A	B	A	B	C	A	B	A	B	B	B
4	23	P	SMA	B	A	B	B	B	A	A	B	B	A	B	B	B	B	B
5	39	L	SD	B	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	C	A	B
6	18	P	SD	A	A	A	B	B	B	B	A	A	B	A	B	A	B	B
7	38	L	SD	B	B	B	B	A	B	B	B	A	C	A	B	B	A	B
8	22	P	SD	B	B	A	B	B	B	B	C	B	B	B	B	A	A	A
9	29	L	SMA	B	B	A	B	B	B	A	A	A	B	A	A	A	A	B
10	32	P	SD	B	B	B	B	B	A	A	A	B	A	B	B	B	B	B
11	30	L	SD	A	A	B	B	A	B	A	B	B	A	A	B	B	B	B
12	37	P	SD	B	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	B	A	A	B
13	35	L	SMP	A	B	B	B	A	B	B	B	B	A	C	A	B	A	A
14	31	P	S1	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	A	A	B	B	B
15	19	L	SMA	A	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	A	A	B	C
16	56	P	SMA	A	B	B	A	B	A	A	B	B	A	A	A	A	B	B
17	43	L	S1	B	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B
18	26	P	SMA	A	A	A	B	B	B	A	B	B	A	A	A	A	B	A
19	21	L	SMA	A	A	B	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	A	A
20	42	P	SMP	A	B	A	B	B	A	B	B	A	B	A	B	B	B	B
21	44	L	SMA	B	A	B	B	A	A	A	B	A	B	B	B	A	A	A
22	37	P	S1	A	B	A	A	A	B	A	A	A	A	B	B	B	B	B
23	24	L	SMA	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	C
24	20	P	SMP	A	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
25	29	L	SD	B	A	A	A	B	B	B	A	B	A	A	B	B	B	B
26	30	P	SD	B	B	B	A	B	A	B	B	B	A	C	A	B	B	A
27	41	L	S1	C	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	A	A	A
28	43	P	SD	A	B	B	A	A	A	A	B	A	A	B	B	B	B	A
29	47	L	SD	B	A	A	A	B	A	A	B	A	A	A	B	A	B	B
30	28	P	SMA	A	B	B	A	A	A	A	B	B	A	B	A	B	B	A
31	33	L	SD	B	B	B	B	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B
32	24	P	SD	A	A	B	B	A	B	A	B	A	B	B	B	A	B	C

1	2	3	4	5				6		7		8			9			
33	30	L	SD	B	A	B	A	A	B	B	C	A	B	A	A	A	B	B
34	34	P	SMA	B	A	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B
35	40	L	SMA	A	B	A	A	A	B	B	A	B	A	A	A	A	B	A
36	24	P	SD	A	B	A	B	B	A	B	A	B	B	A	A	A	B	B

Keterangan:

U : Umur

JK : Jenis Kelamin

P : Pendidikan

A : Berperan

B : Kurang Berperan

C : Tidak Berperan



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Budiarjo, Mariam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Buku Pedoman Penulisan Penelitian. Skripsi Dan kertas Kerja Mahasiswa FISIPOL. UIR : EDISI REVISI 2013
- Budiman, Arif. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan sosial di Dunia*. Suatu pengantar. Yogyakarta : Gajah Mada University Pers.
- Dwipayana, Ari. 2003. *Pembaharuan Desa secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dharma, 2002. *Human Resource Scorecard* : Suatu Model Pengukuran Kinerja Sumber Daya Manusia, Amara Books, yogyakarta
- Hanif Nurcholis. 2004 *Pemerintahan Desa*. Penerbit : Erlangga. Jakarta, Bumi Aksara.
- Ketaren, Nurlela. 2008. *Administrasi Pembangunan*, USU. Word Pers
- Moeljarto, T. 1991. *Politik Pembangunan Strategi* . Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Ndara, Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rhineka Cipta

- Rivai, veithzal. 2004. *Kepemimpinan*. Jakarta : Grafindo Persada
- Siagian, 2012. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, Dan Strateginya*. Jakarta : Bumi Aksara
- Soekanto, 2003. *sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Suroto, 1983. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*. Yogyakarta : Gajah Mada University.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta : Peranda Media.
- Sukarja, Ahmad. 2014. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Persepektif Fikih siyasa*. Jakarta : Sinar Grafika
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem pemerintahan Indonesia*. Rhineka Cipta : Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Mandar Maju
- Usman, Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Wasistiono, Sadu. Dan Irwan Thir. 2007. *Prospek Pembangunan Desa*. Bandung : Fokusmedia
- Wasistiono, Sadu, dan Irawan Tahir. 2003. *Prospek Pembanungan Desa*. Jatinaor : Fokus Media.
- Widjaja, 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama*, Pekanbaru : MarpoyanTujuh

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau